



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan: 1. Menteri Perindustrian; 2. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	12 (dua belas)
Hari/Tanggal	:	Selasa, 5 Juni 2018
W a k t u	:	Pukul 16.10 s.d 17.05 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPG), didampingi oleh: 1. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ FPD); 2. H. Inas Nasrullah Zubir, B.E., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F.Hanura).
Sekretaris Rapat	:	Eguh Setiawan, S.IP. (Plt. Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas RKA dan RKP Kementerian Perindustrian dan BSN Tahun Anggaran 2019.
Hadir	:	1. 27 dari 51 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Perindustrian beserta jajaran; 3. Kepala BSN beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian dan Kepala BSN dibuka pukul 16.10 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja pada hari ini adalah membahas RKA dan RKP Kementerian Perindustrian dan BSN Tahun Anggaran 2019.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri Perindustrian dan Kepala BSN untuk menjelaskan RKA dan RKP Kementerian Perindustrian dan BSN Tahun Anggaran 2019.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan atas penjelasan Menteri Perindustrian dan Kepala BSN.

II. KESIMPULAN

A. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI

1. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perindustrian RI untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam Pagu Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp2.840.310.058.000,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh miliar tiga ratus sepuluh juta lima puluh delapan ribu rupiah).
2. Komisi VI DPR RI memahami pagu indikatif anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S-269/M.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018, tanggal 16 April 2018, sebesar Rp2.735.854.989.000,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp2.510.914.134.000,00 (dua triliun lima ratus sepuluh miliar sembilan ratus empat belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan PNB/BLU sebesar Rp224.940.855.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian alokasi belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp634.964.947.000,00;
 - b. Belanja Operasional yang meliputi biaya operasional perkantoran, pemeliharaan peralatan kantor maupun gedung sebesar Rp256.696.840.000,00;
 - c. Belanja Non-Operasional sebesar Rp1.844.193.202.000,00 yang meliputi kegiatan prioritas nasional dan kegiatan reguler.
3. Komisi VI DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp2.577.300.000.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) untuk menindaklanjuti agenda nasional "Making Indonesia 4.0" melalui implementasi industri 4.0 pada 5 (lima) sektor industri prioritas, serta peningkatan kualitas dan daya saing SDM industri melalui program pengembangan pendidikan vokasi, sehingga total anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2019 menjadi sebesar Rp5.313.154.989.000,00 (lima triliun tiga ratus tiga belas miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

B. BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

4. Komisi VI DPR RI meminta Badan Standardisasi Nasional untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam Pagu Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp182.465.697.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
5. Komisi VI DPR RI memahami pagu indikatif anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nomor: S-269/M.02/2018 dan B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018, tanggal 16 April 2018, sebesar Rp203.342.412.000,00 (dua ratus tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) yang dibagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp99.370.327.000,00;
 - b. Program Pengembangan Standardisasi Nasional sebesar Rp103.972.085.000,00, termasuk proyek prioritas nasional sebesar Rp62.736.000.000,00.

6. Komisi VI DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran Badan Standardisasi Nasional sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) sehingga total anggaran Badan Standardisasi Nasional menjadi sebesar Rp235.342.412.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.05 WIB.